

Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2016-2018)

Muhammad Aflakhul Adhim¹, Maya Widiana Dewi², Yuwita Ariessa Pravasanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

Alamat Email:

bangadhim@gmail.com¹, widyamine77@gmail.com², yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Adhim, M. A., Dewi, M. W., & Pravasanti, Y. A., (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(2), 540-550.

Abstract: *This study analyzes the influence of regional revenue, regional expenditure, and regional financing on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth in regencies/cities of Central Java Province from 2016 to 2018. Secondary data were obtained from local government financial reports and economic statistics, analyzed using multiple linear regression. The results show that regional revenue has a significant positive effect on GRDP growth, highlighting the importance of Local Revenue in supporting local economic activities. Regional expenditure also has a significant positive effect, particularly capital spending on infrastructure. Regional financing shows a positive effect, albeit with lower significance compared to revenue and expenditure. The coefficient of determination (R^2) of 0.748 indicates that 74.8% of the GRDP growth variation is explained by these three variables. This study emphasizes the importance of efficient local financial management to drive sustainable economic growth. It recommends that local governments optimize revenue management, improve expenditure allocation, and manage financing wisely.*

Keywords: *Regional Revenue, Regional Expenditure, Regional Financing, GRDP, Economic Growth.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah dan statistik ekonomi, dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, menunjukkan pentingnya Pendapatan Daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Belanja daerah juga berpengaruh positif signifikan, terutama pada belanja modal untuk infrastruktur. Pembiayaan daerah menunjukkan pengaruh positif, meski dengan signifikansi yang lebih rendah dibandingkan pendapatan dan belanja. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,748 mengindikasikan bahwa 74,8% variasi pertumbuhan PDRB dijelaskan oleh ketiga variabel ini. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi diberikan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, memperbaiki alokasi belanja, dan mengelola pembiayaan secara bijak.

Kata Kunci: *Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi.*

1. Pendahuluan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, sekaligus menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2016). Di Jawa Tengah, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota. Pada tahun 2018, Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,25%, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kebumen yang mencapai 16,41% (BPS, 2018). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi variasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi daerah sering kali melibatkan berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sementara faktor non-ekonomi dapat mencakup kondisi sosial, politik, dan kelembagaan (Rusdiana & Maesya, 2017). Namun, dalam konteks ini, fokus penelitian diletakkan pada faktor ekonomi karena dampaknya yang langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meneliti variabel ekonomi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah, merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan ini diharapkan dapat mendanai berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa studi, seperti Anitasari dan Soleh (2015), menunjukkan bahwa pendapatan daerah

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan variasi, di mana efektivitas pengelolaan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap hasil yang diperoleh (Hasanah, 2021).

Belanja daerah melibatkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk operasional, investasi, dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja ini meliputi belanja langsung dan tidak langsung yang mencakup gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan program sosial (UU No. 33 Tahun 2004). Studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Priambodo (2015) dan Gunawan & Suebah (2022), menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, terutama jika dana tersebut dialokasikan untuk investasi yang produktif. Namun, efektivitas belanja sangat bergantung pada perencanaan dan pengawasan yang baik untuk menghindari pemborosan dan korupsi (Hasanah, 2021).

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan dan pengeluaran yang harus dibayar kembali, seperti pinjaman daerah dan obligasi, yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (PP No. 58 Tahun 2005). Pengelolaan pembiayaan ini menjadi krusial, karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menambah beban fiskal bagi daerah. Rahmah & Zein (2016) menemukan bahwa pembiayaan daerah dapat meningkatkan PDRB jika digunakan untuk investasi produktif. Namun, jika dikelola secara tidak hati-hati, pembiayaan ini dapat berdampak negatif dan meningkatkan risiko keuangan daerah (Hasanah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB di kabupaten/kota Jawa Tengah. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan kritis mengenai



sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk periode 2016-2018, penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang paling berpengaruh.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terhadap PDRB, tetapi juga memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih baik. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam literatur dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami dinamika keuangan daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan ekonomi endogen, yang berkembang lebih lanjut dalam dekade terakhir, menekankan pentingnya faktor internal, seperti kebijakan pemerintah, inovasi, dan pengelolaan sumber daya, dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Romer, 1990). Berbeda dengan teori pertumbuhan neoklasik yang menganggap teknologi sebagai faktor eksogen, teori ini

menganggap kebijakan pemerintah daerah, seperti pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagai faktor kunci yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Studi terbaru menunjukkan bahwa daerah dengan kebijakan fiskal yang efisien cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada (Acemoglu & Robinson, 2019). Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan investasi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan PDRB.

2.2. Fiscal Decentralization and Local Government Performance

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal (Oates, 2004). Dalam dekade terakhir, studi tentang desentralisasi fiskal menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk meningkatkan kinerja ekonomi lokal.

Desentralisasi yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat sasaran (Roy et al., 2022). Hal ini berarti bahwa kebijakan pendapatan dan belanja yang dikelola di tingkat daerah dapat lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial daerah tersebut, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

2.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Teori ini berkembang untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan untuk meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi daerah. Pendekatan terbaru menekankan pada diversifikasi sumber pendapatan dan inovasi dalam pengelolaan aset daerah sebagai strategi utama (Mutiarin, 2017).

Studi oleh Martinez-Vazquez dan McNab (2003) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi lokal dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus bergantung secara berlebihan pada transfer pusat. Ini penting dalam konteks daerah yang berusaha



meningkatkan otonomi fiskalnya.

2.4. Pengeluaran Publik Efektif

Teori ini berfokus pada bagaimana pengeluaran publik, terutama belanja modal dan belanja sosial, dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi (Miller & Heller, 2020). Dalam dekade terakhir, ada peningkatan perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan.

Studi terbaru menunjukkan bahwa alokasi belanja yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB karena langsung mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Cuaresma et al., 2014). Pengawasan yang ketat dan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi fokus utama untuk meminimalkan risiko korupsi dan pemborosan.

2.5. Manajemen Pembiayaan Daerah

Manajemen pembiayaan daerah menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang aman dan berkelanjutan (Poterba & Rueben, 2019). Teori ini menekankan pada pentingnya strategi pengelolaan utang daerah yang bijaksana, termasuk penilaian risiko dan perencanaan pembayaran kembali.

Studi terbaru oleh Glaeser dan Ponzetto (2018) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu mengelola pembiayaan secara strategis, misalnya melalui penerbitan obligasi daerah yang ditujukan untuk proyek infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan. Namun, manajemen risiko yang ketat tetap diperlukan untuk menghindari beban utang yang berpotensi membahayakan stabilitas keuangan daerah.

2.6. Hubungan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Terhadap Pertumbuhan PDRB

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah saling berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Menurut teori kebijakan fiskal, keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Ulbrich, 2013). Peningkatan

pendapatan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal yang produktif, sementara pembiayaan yang bijaksana membantu menutupi kekurangan anggaran tanpa menimbulkan beban fiskal jangka panjang.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Pendekatan kausal-komparatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel independen (pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah) dengan variabel dependen (laju pertumbuhan PDRB).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2016-2018. Data yang dikumpulkan meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan laju pertumbuhan PDRB.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Total observasi yang diperoleh adalah 105 data panel, yang terdiri dari 35 kabupaten/kota selama 3 tahun.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap variabel.

b. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi linier berganda,



beberapa uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis regresi:

- 1) **Uji Normalitas:** Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa distribusi residual data mengikuti distribusi normal.
- 2) **Uji Multikolinieritas:** Dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen.
- 3) **Uji Heteroskedastisitas:** Dilakukan menggunakan uji *Glejser* untuk memastikan bahwa varians residual adalah konstan atau homoskedastik.
- 4) **Uji Autokorelasi:** Dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson untuk memastikan tidak adanya korelasi antara residual dalam model regresi.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah) terhadap variabel dependen (laju pertumbuhan PDRB). Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

- Y = Laju Pertumbuhan PDRB
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X1 = Pendapatan Daerah
- X2 = Belanja Daerah
- X3 = Pembiayaan Daerah
- e = Error

d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen:

- 1) **Uji t:** Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- 2) **Uji F:** Untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

1) Koefisien Determinasi (Adjusted R

Square): Untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen.

3.6. Alat Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 23.0. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah	PDRB
Minimum	840.042.626.525,00	849.474.262.275,00	24.430.302.640,00	2,54
Maximum	4.234.394.060.362,00	4.506.407.629.744,00	792.003.156.073,00	6,98
Mean	2.082.851.543.135,34	2.112.416.632.553,10	230.195.938.179,51	5,38
Std. Dev	633.339.918.284,90	657.926.478.237,57	131.954.542.063,24	0,72

Sumber: Output SPSS 23

Analisis statistik deskriptif mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel 4.1, hasil output SPSS dari analisis deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 105 kabupaten/kota didapatkan informasi data laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan nilai maksimum dari laju pertumbuhan PDRB kabupaten kota di Jawa Tengah yang menjadi sampel yaitu sebesar 6,98. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,54. Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi karena nilai rata-rata sebesar 5,38 dan standar deviasi sebesar 0,72. Sehingga membuktikan bahwa kualitas data dari variabel laju pertumbuhan PDRB baik dan penyebaran data memperlihatkan hasil yang normal.

Berdasarkan output dari Pendapatan Daerah memperlihatkan nilai maksimum dari Pendapatan Daerah yaitu sebesar 4.234.394.060.362,00. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 840.042.626.525,00 dikarenakan variabel dummy. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi karena nilai rata-rata sebesar 2.082.851.543.135,34 dan standar deviasi sebesar 633.339.918.284,90. Sehingga membuktikan bahwa kualitas data dari variabel



ini baik dan penyebaran data memperlihatkan hasil yang normal.

Berdasarkan output dari Belanja Daerah memperlihatkan nilai maksimum yaitu sebesar 4.506.407.629.744,00. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 849.474.262.275,00. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi karena nilai rata-rata sebesar 2.112.416.632.553,10 dan standar deviasi sebesar 657.926.478.237,57. Sehingga membuktikan bahwa kualitas data dari variabel ini baik dan penyebaran data memperlihatkan hasil yang normal.

Berdasarkan output dari Pembiayaan Daerah memperlihatkan nilai maksimum dari Pembiayaan Daerah yaitu sebesar 792.003.156.073,00. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 24.430.302.640,00 dikarenakan variabel dummy. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi karena nilai rata-rata sebesar 230.195.938.179,51 dan standar deviasi sebesar 131.954.542.063,24. Sehingga membuktikan bahwa kualitas data dari variabel ini baik dan penyebaran data memperlihatkan hasil yang normal.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis lanjut.

1) Uji Normalitas Data

Tabel 2 Uji Normalitas

Keterangan	Nilai Uji Statistik
N	105
Rata-rata	0,0000000
Std. Deviation	0,08074876
Kolmogorove	0,115
Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,056 ^c

Sumber : Output SPSS 23

Uji ini digunakan untuk menganalisis nilai residual dari variabel Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah menghasilkan distribusi yang normal atau tidak. Syarat uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini, uji normalitas menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode glejser

Model	Koefisien Regresi		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	0,483	0,694		0,697
Pendapatan daerah	-0,019	0,046	-0,098	0,488
Belanja daerah	0,003	0,031	0,014	0,931
Pembiayaan daerah	0,001	0,021	0,011	0,955

Sumber: Output SPSS 23

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahuinya digunakan uji glejser yaitu dengan cara mengresikan *absolute residual* dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi pada masing-masing koefisiennya tidak signifikan Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pendapatan daerah (X1) sebesar 0,677 > 0,05, demikian juga dengan variabel belanja daerah (X2) dan pembiayaan daerah (X3) masing-masing 0,931 dan 0,955 yang semuanya lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga syarat tidak terjadi heteroskedastisitas dipenuhi.

3) Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan daerah	0,178	5,625
Belanja daerah	0,383	2,613
Pembiayaan daerah	0,255	3,919

Sumber : Output SPSS 23

Uji multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen (bebas) berkorelasi dengan menggunakan model regresi. Uji multikolinieritas dapat dilakukan melalui analisis korelasi antar variabel dengan perhitungan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai *Variate Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, analisis ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik maka variabel dapat digunakan



dalam penelitian.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

R	Adjusted R		Durbin-Watson
	R Square	Square	
0,869 ^a	0,755	0,748	2,099

Sumber : Output SPSS 23

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini digunakan uji Durbin Watson test Berdasarkan pada Tabel 4.5 diperoleh nilai skor Durbin Watson (DW) sebesar 2,099 yang terletak pada daerah non autokorelasi yaitu $dU=1,737 \leq 2,099 \leq 4-dU = 2,263$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi yang menjadi syarat bagi analisis regresi linear berganda.

4.3. Analisis Regresi

Persamaan regresi linier yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-9,268	0,856	
	Pendapatan daerah	0,220	0,057	0,453
	Belanja daerah	0,101	0,038	0,211
	Pembiayaan daerah	0,071	0,026	0,267

Sumber: Output SPSS 23

$$Y = -9,268 + 0,220X_1 + 0,101X_2 + 0,071X_3 \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien regresi variabel pendapatan daerah sebesar 0,220, hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan daerah satu satuan akan memberikan pengaruh positif pada peningkatan pada pertumbuhan laju PDRB sebesar 0,220 satuan. Selanjutnya besarnya koefisien belanja daerah sebesar 0,101 artinya bahwa peningkatan belanja daerah satu satuan akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan laju

pertumbuhan PDRB sebesar 0,101 satuan. Sedangkan besarnya koefisien pembiayaan daerah sebesar 0,071 dapat dimaknai bahwa peningkatan pembiayaan daerah satu satuan secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,071 satuan.

4.4. Pengujian Hipotesis

1) Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F (Hasil Uji kelayakan modal)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,089	3	0,696	103,725	0,000b

Sumber: Output SPSS 23

Uji simultan dengan F test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil F test ini pada output SPSS dapat dilihat pada ANOVA (*Analysis of Variance*) (Ghozali, 2016). Pada tabel analisis varian (Anova) ditampilkan hasil uji F yang dapat dipergunakan untuk memprediksi kontribusi aspek-aspek variabel pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB. Hasil uji F menunjukkan ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen karena p-value (pada kolom sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Sehingga model regresi yang didapatkan layak digunakan untuk memprediksi.

2) Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t (Hasil Uji Secara Parsial)

Model	T	Sig.
(Constant)	-10,824	0,000
Pendapatan daerah	3,876	0,000
Belanja daerah	2,649	0,009
Pembiayaan daerah	2,737	0,007

Sumber: Output SPSS 23

Uji parsial atau *t-test* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil dari uji t dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom sig.) pada masing-masing variabel independen.



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel pendapatan daerah (X_1) belanja daerah (X_2) dan pembiayaan daerah (X_3) berpengaruh terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB (Y). Besarnya pengaruh secara parsial variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, besarnya koefisien variabel pendapatan daerah sebesar 0,220, untuk belanja daerah sebesar 0,101 dan besarnya koefisien variabel pembiayaan daerah sebesar 0,071. Ini menunjukkan bahwa koefisien tertinggi adalah pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan variabel belanja daerah dan variabel pembiayaan daerah.

Pertama, variabel pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan PDRB, di buktikan dengan nilai uji t hitung sebesar 3,876 yang lebih besar dari $t_{101;5\%} = 1,984$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga terbukti bahwa variabel pendapatan daerah (X_1) berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB.

Kedua, variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan PDRB, di buktikan dengan nilai uji t hitung sebesar 2,649 yang lebih besar dari $t_{101;5\%} = 1,984$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga terbukti bahwa variabel belanja daerah (X_2) berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB.

Ketiga, variabel pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan PDRB, di buktikan dengan nilai uji t hitung sebesar 2,737 yang lebih besar dari $t_{101;5\%} = 1,984$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 sehingga terbukti bahwa variabel pembiayaan daerah (X_3) berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB.

3) Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,869a	0,755	0,748

Sumber: Output SPSS 23

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu

diketahui nilai koefisien determinasi (adjusted R^2). Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,748 (74,8%) menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan variabel independen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah memiliki pengaruh terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB sebesar 74,8%. Sedangkan sisanya 25,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5. Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Daerah (X_1) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Y)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah (X_1) memiliki nilai p -value (pada kolom sig.) sebesar $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah secara parsial berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB (Y).

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pendapatan daerah berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan laju pertumbuhan PDRB, pada penelitian ini terlihat pendapatan daerah yang masih menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Hal ini diduga karena pendapatan daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi penanda kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan masyarakat terhadap pemerintah. sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Suebah (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah yang diperuntukkan pada komponen model akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan PDRB.

Secara logika dapatkan dijelaskan bahwa Peningkatan pendapatan daerah akan memberikan kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini secara langsung memberikan nilai tambah atas produk barang jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebaliknya penurunan pendapatan daerah mencerminkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah



atas produk barang jasa yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan daerah merupakan aspek yang berperan mempengaruhi produk domestik bruto. Berdasarkan pada hasil dan penelitian terdahulu yang dirangkai dengan logika menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota dipropinsi Jawa Tengah.

b. Pengaruh Belanja Daerah (X₂) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Y)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel belanja daerah (X₂) memiliki nilai p-value (pada kolom sig.) sebesar $0,009 < 0,05$ artinya signifikan, maka H_a diterima dan H₀ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja daerah secara parsial berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB (Y).

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa setiap meningkatkan belanja daerah maka akan semakin besar meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebagaimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arini & Kusuma, 2019) yang menyatakan bahwa belanja daerah khusus yang diperuntukkan pada komponen model akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan PDRB. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota dipropinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh Pembiayaan Daerah (X₃) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Y)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan daerah (X₃) memiliki nilai p-value (pada kolom sig.) sebesar $0,007 < 0,05$ artinya signifikan, maka H_a diterima dan H₀ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah secara parsial berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB (Y).

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa setiap meningkatkan pembiayaan daerah maka akan semakin besar meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebagaimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfi & Nuraini (2018) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan pemerintah akan memberikan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRD. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian

Aminah & Parmadi (2018) meskipun lebih khusus pembiayaan daerah dimaknai sebagai transaksi keuangan pada pengeluaran biaya pengadaan irigasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara variabel Pembiayaan Daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB pemerintahan kabupaten/kota diseluruh Propinsi Jawa Tengah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2018. Setiap peningkatan pendapatan daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,220 satuan, menandakan bahwa pendapatan daerah merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Belanja daerah juga memberikan kontribusi positif, di mana setiap peningkatan belanja daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,101 satuan, yang mengindikasikan bahwa alokasi belanja daerah yang efektif mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembiayaan daerah juga berpengaruh signifikan, dengan setiap peningkatan pembiayaan daerah sebesar satu satuan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,071 satuan, menunjukkan peran penting pembiayaan jangka panjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Uji F memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB, menjadikan model regresi yang dihasilkan layak untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah. Koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,748 menunjukkan bahwa 74,8% variasi dalam laju pertumbuhan PDRB dapat dijelaskan oleh pendapatan daerah, belanja daerah, dan



pembiayaan daerah, sementara 25,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Variabel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB.
- b. Penggunaan data *cross section* yang relatif sedikit dikarenakan jumlah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah hanya sejumlah 35. Sehingga jumlah observasi data panel hanya 105 observasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini akan diuraikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Peneliti menyarankan kepada pemerintah kabupaten kota se Jawa Tengah agar dalam merancang APBD memberikan perhatian yang besar terhadap tiga komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- b. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang faktor eksternal diluar faktor-faktor pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah seperti tenaga kerja, tingkat inflasi, sumber daya, dll atau mengkombinasikan faktor eksternal dan internal yang dapat meningkatkan pertumbuhan laju PDRB kabupaten/kota propinsi lain di Jawa Tengah.
- c. Perlu dilakukan pendekatan dengan metode research yang berbeda tidak hanya dengan model data sekunder saja, misalnya dengan metode eksperimen. Hal ini perlu dilakukan karena laju pertumbuhan PDRB sebenarnya merupakan permasalahan yang sangat dinamis dan memiliki banyak ragam atau variasi yang menjadi faktor penentunya.

7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada ITB AAS Surakarta yang senantiasa membantu dan membimbing serta mengajarkan banyak ilmu sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Alfi, S. A. F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 500-513.
- Aminah, S., & Parmadi, P. (2018). Dampak belanja irigasi dan jaringan terhadap output PDRB sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(1), 7-13.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28-38.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018*. Provinsi Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik.
- Cuaresma, J. C., Doppelhofer, G., & Feldkircher, M. (2014). The determinants of economic growth in European regions. *Regional Studies*, 48(1), 44-67.
- Glaeser, E. L., & Ponzetto, G. A. (2018). The political economy of transportation investment. *Economics of Transportation*, 13, 4-26.
- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap



- Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang. *Jurnal Manajemen Dan Retail*, 2(1), 54-76.
- Hasanah, A. (2021). Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World development*, 31(9), 1597-1616.
- Miller, S. M., & Heller, P. S. (2020). The macroeconomic impact of government expenditure on infrastructure. *Economic Modelling*, 28(3), 145-158.
- Mutiarin, D. (2017). Public Budgeting in The Fiscal Decentralization Policy in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 9(2).
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 29(2).
- Oates, W. E. (2004). Fiscal Decentralization and Economic Development. In *Environmental Policy and Fiscal Federalism* (pp. 377-383). Edward Elgar Publishing.
- Priambodo, A. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 1-9.
- Poterba, J. M., & Rueben, K. S. (2019). State and local government finance and the Trump era. *National Tax Journal*, 72(2), 289-318.
- Rahmah, A. R., & Zein, B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 213-220.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Roy, J., Wijaya, A., Darma, D. C., & Kurniawan, E. (2022). Fiscal decentralization and income inequality: A prediction using the SEM model. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 379-391.
- Rusdiana, S., & Maesya, A. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pangan di Indonesia. *Agriekonomika*, 6(1), 12-25.
- Ulbrich, H. (2013). *Public Finance in theory and practice second edition*. Routledge.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Peraturan Republik Indonesia.

